



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui RKD dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - c. daftar Rekapitulasi Penyetoran Pajak tahun sebelumnya; dan
 - d. laporan Realisasi Penggunaan ADD tahap sebelumnya keluaran Aplikasi Siskeudes.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. tahap IV, paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - e. besaran realisasi pembayaran ADD tahap IV tergantung dari realisasi penerimaan transfer ke RKUD dari RKUN.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu.

- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD dari RKUD secara langsung ke RKD.
- (8) Pencairan dana pada Bank harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyusun Anggaran Kas Desa setelah ditetapkannya APB Desa;
 - b. pencairan dana dari kas Desa dilakukan setiap bulan sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas; dan
 - c. dalam hal pencairan dana dari kas Desa tidak dilakukan setiap bulan maka Desa dapat mencairkan dana dari kas Desa sesuai dengan kebutuhan bulan sebelumnya ditambah bulan berjalan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas.
- (9) persyaratan penyaluran ditetapkan dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. syarat umum:
 1. surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa;
 2. surat Pakta Integritas Penerima Bantuan Keuangan berupa uang dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 3. surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 4. kwitansi Pembayaran atas Nama Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 5. fotokopi rekening giro yang masih aktif atas nama Desa yang dilegalisir oleh bank;
 6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa; dan
 7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
 - b. syarat khusus:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa dalam bentuk PDF;
 2. daftar Rekap Realisasi Pajak dan bukti setoran pajak;
 3. data laporan konvergensi stunting;
 4. laporan Realisasi Penggunaan Dana APB Desa berdasarkan sumber dana; dan
 5. syarat khusus lainnya yang dibutuhkan.

- c. Setiap Persyaratan Penyaluran Umum dan Khusus wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh Tenaga Akuntansi Desa dan diketahui minimal oleh Kepala Seksi PMD Kecamatan setempat.
- d. Apabila Pemerintah Desa tidak menyetor pajak sesuai ketentuan terhutang pajak pada realisasi belanja di APB Desa sebagaimana angka 2 (dua) huruf b, maka penyaluran ADD ditunda sampai realisasi pajak terpenuhi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 81

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 81 Tahun 2020

TANGGAL 8 Desember 2020

ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
I.	KECAMATAN BENGKALIS			
1.	KELAPAPATI	1.046.249.923	916.426.207	1.962.676.130
2.	PEDEKIK	1.046.249.923	440.766.530	1.487.016.453
3.	PANGKALAN BATANG	1.046.249.923	496.523.894	1.542.773.818
4.	SEBAUK	1.046.249.923	316.215.534	1.362.465.457
5.	TELUK LATAK	1.046.249.923	391.030.349	1.437.280.272
6.	MESKOM	1.046.249.923	373.923.550	1.420.173.473
7.	SENGGORO	1.046.249.923	838.118.105	1.884.368.028
8.	AIR PUTIH	1.046.249.923	496.326.755	1.542.576.679
9.	SUNGAI ALAM	1.046.249.923	455.540.275	1.501.790.199
10.	PENAMPI	1.046.249.923	292.627.927	1.338.877.850
11.	TAMERAN	1.046.249.923	342.697.018	1.388.946.941
12.	PENEHAL	1.046.249.923	440.628.239	1.486.878.162
13.	PEMATANG DUKU	1.046.249.923	512.333.474	1.558.583.397
14.	KETAM PUTIH	1.046.249.923	364.103.476	1.410.353.399
15.	KELEMANTAN	1.046.249.923	314.385.315	1.360.635.239
16.	SEKODI	1.046.249.923	480.505.035	1.526.754.958
17.	WONOSARI	1.046.249.923	865.993.042	1.912.242.965
18.	KUALA ALAM	1.046.249.923	370.972.132	1.417.222.055
19.	KELEBUK	1.046.249.923	190.026.752	1.236.276.675
20.	PALKUN	1.046.249.923	261.797.612	1.308.047.535
21.	SUNGAI BATANG	1.046.249.923	303.852.325	1.350.102.248
22.	PRAPAT TUNGGAL	1.046.249.923	267.975.113	1.314.225.036
23.	SIMPANG AYAM	1.046.249.923	252.555.359	1.298.805.283
24.	SENDERAK	1.046.249.923	324.576.478	1.370.826.401
25.	KELEMANTAN BARAT	1.046.249.923	300.202.241	1.346.452.165
26.	DAMAI	1.046.249.923	268.497.552	1.314.747.476
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	1.046.249.923	358.669.320	1.404.919.244
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	1.046.249.923	316.647.405	1.362.897.329
	JUMLAH	29.294.997.849	11.553.917.015	40.848.914.864
II.	KECAMATAN BANTAN			
1.	BANTAN TENGAH	1.046.249.923	524.781.843	1.571.031.766
2.	BANTAN AIR	1.046.249.923	333.642.856	1.379.892.779
3.	BANTAN TUA	1.046.249.923	553.551.806	1.599.801.729
4.	TELUK PAMBANG	1.046.249.923	265.906.447	1.312.156.370
5.	SELAT BARU	1.046.249.923	579.642.431	1.625.892.355
6.	TELUK LANCAR	1.046.249.923	442.724.003	1.488.973.926
7.	KEMBUNG LUAR	1.046.249.923	471.540.663	1.517.790.586
8.	JANGKANG	1.046.249.923	468.349.323	1.514.599.246
9.	MUNTAI	1.046.249.923	425.399.559	1.471.649.482
10.	RESAM LAPIS	1.046.249.923	246.768.113	1.293.018.036
11.	BERANCAH	1.046.249.923	481.533.322	1.527.783.245
12.	ULU PULAU	1.046.249.923	286.013.060	1.332.262.983
13.	MENTAYAN	1.046.249.923	218.369.690	1.264.619.613
14.	PAMBANG PESISIR	1.046.249.923	281.572.377	1.327.822.300
15.	SUKA MAJU	1.046.249.923	429.873.243	1.476.123.166
16.	PAMBANG BARU	1.046.249.923	295.295.812	1.341.545.736
17.	KEMBUNG BARU	1.046.249.923	360.369.368	1.406.619.291
18.	PASIRAN	1.046.249.923	249.899.816	1.296.149.739
19.	BANTAN SARI	1.046.249.923	219.336.827	1.265.586.750
20.	BANTAN TIMUR	1.046.249.923	342.805.826	1.389.055.749
21.	TELUK PAPAL	1.046.249.923	360.821.037	1.407.070.960
22.	MUNTAI BARAT	1.046.249.923	247.754.392	1.294.004.315
23.	DELUK	1.046.249.923	276.980.558	1.323.230.481
	JUMLAH	24.063.748.233	8.362.932.369	32.426.680.603

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
III.	KECAMATAN BUKIT BATU			
1.	SEJANGAT	1.046.249.923	389.056.790	1.435.306.713
2.	DOMPAS	1.046.249.923	288.392.628	1.334.642.551
3.	PANGKALAN JAMBI	1.046.249.923	266.873.308	1.313.123.231
4.	SUNGAI SELARI	1.046.249.923	384.179.340	1.430.429.263
5.	BURUK BAKUL	1.046.249.923	246.249.333	1.292.499.256
6.	BUKIT BATU	1.046.249.923	203.318.512	1.249.568.435
7.	SUKAJADI	1.046.249.923	361.231.826	1.407.481.749
8.	BATANG DUKU	1.046.249.923	432.496.940	1.478.746.863
9.	PAKNING ASAL	1.046.249.923	630.711.556	1.676.961.479
	JUMLAH	9.416.249.309	3.202.510.231	12.618.759.540
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA			
1.	PARIT I API-API	1.046.249.923	157.519.103	1.203.769.026
2.	TEMIANG	1.046.249.923	284.371.624	1.330.621.548
3.	API - API	1.046.249.923	290.641.753	1.336.891.676
4.	TENGGAYUN	1.046.249.923	375.918.800	1.422.168.723
5.	SEPAHAT	1.046.249.923	300.477.221	1.346.727.144
6.	BUKIT KERIKIL	1.046.249.923	709.509.824	1.755.759.747
7.	TANJUNG LEBAN	1.046.249.923	327.927.460	1.374.177.383
	JUMLAH	7.323.749.462	2.446.365.784	9.770.115.247
V.	KECAMATAN MANDAU			
1.	BATHIN BETUAH	1.046.249.923	461.756.927	1.508.006.851
2.	HARAPAN BARU	1.046.249.923	565.453.407	1.611.703.330
	JUMLAH	2.092.499.846	1.027.210.334	3.119.710.181
V.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN			
1.	BALAI MAKAM	1.046.249.923	1.186.421.930	2.232.671.853
2.	PETANI	1.046.249.923	939.068.119	1.985.318.042
3.	SEBANGAR	1.046.249.923	1.059.672.240	2.105.922.163
4.	BUMBUNG	1.046.249.923	807.771.389	1.854.021.312
5.	KESUMBO AMPAI	1.046.249.923	641.468.927	1.687.718.851
6.	TAMBUSAI BATANG DUI	1.046.249.923	1.040.151.384	2.086.401.307
7.	SIMPANG PADANG	1.046.249.923	1.262.793.794	2.309.043.717
8.	PEMATANG OBO	1.046.249.923	693.890.376	1.740.140.299
9.	AIR KULIM	1.046.249.923	804.193.309	1.850.443.233
10.	BULUH MANIS	1.046.249.923	678.950.973	1.725.200.896
11.	BONCAH MAHANG	1.046.249.923	1.291.198.994	2.337.448.917
12.	PAMESI	1.046.249.923	406.566.718	1.452.816.641
13.	BATHIN SOBANGA	1.046.249.923	471.640.818	1.517.890.741
	JUMLAH	13.601.249.001	11.283.788.971	24.885.037.972
VI.	KECAMATAN RUPAT			
1.	SUNGAI CINGAM	1.046.249.923	461.245.074	1.507.494.997
2.	TELUK LECAH	1.046.249.923	526.713.621	1.572.963.545
3.	MAKERUH	1.046.249.923	485.374.386	1.531.624.309
4.	HUTAN PANJANG	1.046.249.923	404.048.318	1.450.298.241
5.	PANGKALAN NYIRIH	1.046.249.923	491.425.270	1.537.675.193
6.	SUKARJO MESIM	1.046.249.923	447.196.312	1.493.446.235
7.	DARUL AMAN	1.046.249.923	424.247.362	1.470.497.285
8.	PARIT KEBUMEN	1.046.249.923	299.256.829	1.345.506.752
9.	SRI TANJUNG	1.046.249.923	364.761.858	1.411.011.781
10.	PANCUR JAYA	1.046.249.923	347.887.160	1.394.137.083
11.	PANGKALAN PINANG	1.046.249.923	227.822.498	1.274.072.421
12.	DUNGUN BARU	1.046.249.923	285.964.712	1.332.214.635
	JUMLAH	12.554.999.078	4.765.943.399	17.320.942.478
VII.	KECAMATAN RUPAT UTARA			
1.	TANJUNG MEDANG	1.046.249.923	471.921.279	1.518.171.203
2.	TELUK RHU	1.046.249.923	558.261.562	1.604.511.485
3.	TANJUNG PUNAK	1.046.249.923	248.668.763	1.294.918.687
4.	KADUR	1.046.249.923	448.817.131	1.495.067.054
5.	TITI AKAR	1.046.249.923	867.074.831	1.913.324.754
6.	HUTAN AYU	1.046.249.923	244.573.997	1.290.823.920
7.	SUKA DAMAI	1.046.249.923	209.905.626	1.256.155.549
8.	PUTERI SEMBILAN	1.046.249.923	351.672.167	1.397.922.090
	JUMLAH	8.369.999.386	3.400.895.356	11.770.894.742

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
VIII.	KECAMATAN SIAK KECIL			
1.	LUBUK MUDA	1.046.249.923	471.082.703	1.517.332.626
2.	TANJUNG BELIT	1.046.249.923	372.930.472	1.419.180.395
3.	SUNGAI SIPUT	1.046.249.923	204.168.498	1.250.418.422
4.	SEPOTONG	1.046.249.923	215.348.783	1.261.598.706
5.	LUBUK GAUNG	1.046.249.923	450.324.823	1.496.574.746
6.	LANGKAT	1.046.249.923	331.123.297	1.377.373.220
7.	SADAR JAYA	1.046.249.923	348.734.774	1.394.984.697
8.	SUNGAI LINAU	1.046.249.923	189.559.105	1.235.809.028
9.	BANDAR JAYA	1.046.249.923	408.904.793	1.455.154.716
10.	MUARA DUA	1.046.249.923	300.618.395	1.346.868.318
11.	TANJUNG DAMAI	1.046.249.923	253.851.140	1.300.101.064
12.	SUMBER JAYA	1.046.249.923	244.378.932	1.290.628.855
13.	LUBUK GARAM	1.046.249.923	380.064.619	1.426.314.542
14.	LIANG BANIR	1.046.249.923	172.304.547	1.218.554.470
15.	TANJUNG DATUK	1.046.249.923	184.488.123	1.230.738.046
16.	KOTO RAJA	1.046.249.923	260.656.312	1.306.906.235
17.	SUNGAI NIBUNG	1.046.249.923	329.230.504	1.375.480.427
	JUMLAH	17.786.248.694	5.117.769.820	22.904.018.514
IX.	KECAMATAN PINGGIR			
1.	BALAI PUNGUT	1.046.249.923	570.215.602	1.616.465.525
2.	MUARA BASUNG	1.046.249.923	940.939.359	1.987.189.283
3.	PINGGIR	1.046.249.923	909.155.278	1.955.405.201
4.	SEMUNAI	1.046.249.923	1.122.919.637	2.169.169.560
5.	TENGGANAU	1.046.249.923	984.883.393	2.031.133.317
6.	SUNGAI MERANTI	1.046.249.923	592.411.172	1.638.661.095
7.	PANGKALAN LIBUT	1.046.249.923	327.365.821	1.373.615.744
8.	BULUH APO	1.046.249.923	451.745.428	1.497.995.351
	JUMLAH	8.369.999.386	5.899.635.691	14.269.635.076
X.	KECAMATAN TALANG MUANDAU			
1.	TASIK TEBING SERAI	1.046.249.923	266.681.652	1.312.931.575
2.	TASIK SERAI BARAT	1.046.249.923	847.620.109	1.893.870.032
3.	KUALA PENASO	1.046.249.923	263.833.633	1.310.083.556
4.	BERINGIN	1.046.249.923	379.714.523	1.425.964.446
5.	KOTO PAIT BERINGIN	1.046.249.923	402.736.913	1.448.986.836
6.	MELIBUR	1.046.249.923	249.043.032	1.295.292.955
7.	TASIK SERAI TIMUR	1.046.249.923	554.425.259	1.600.675.183
8.	SERAI WANGI	1.046.249.923	331.884.142	1.378.134.065
9.	TASIK SERAI	1.046.249.923	624.515.861	1.670.765.784
	JUMLAH	9.416.249.309	3.920.455.124	13.336.704.433
	TOTAL	142.289.989.554,01	60.981.424.094,57	203.271.413.648,58

Pj. BUPATI BENGKALIS,


H. SYAHRIAL ABDI